

PERANG SAUDARA SERTA PROSPEK LIBYA DAN 'THE ARAB SPRING'

Poltak Partogi Nainggolan

7

Abstrak

Pertarungan kekuasaan yang belum selesai di Libya antara rezim sementara sipil dan mantan orang militer Khadafi telah mempertaruhkan masa depan negeri itu. Transisi demokratis selama 8 tahun yang tidak berjalan baik di bawah PM al-Sarraj, yang seharusnya dapat diakhiri melalui pelaksanaan pemilu tahun ini, terancam gagal, akibat konflik bersenjata yang dipicu aksi ofensif Jenderal Haftar. Langkah Sekjen PBB yang gagal mencegah dan mengakhiri upaya kudeta, membuat prospek Libya tidak jelas, akibat anarki berkepanjangan. Tekanan dunia internasional yang seirama dan lebih efektif, dibutuhkan, untuk menghindari munculnya 'proxy war' baru, yang kian menyulitkan keadaan. Upaya membawa kembali pihak yang bertikai ke solusi damai, dengan pelaksanaan pemilu yang representatif dan fair, harus dilakukan. Hal ini akan memberi kepastian bagi stabilitas politik dan keamanan Libya, sehingga dapat mendorong kembali 'Musim Semi Demokrasi' di dunia Arab. Tulisan ini membahas tentang ancaman perang saudara di Libya dan akibatnya terhadap prospek Libya pasca-Khadafi.

Pendahuluan

Terpengaruh oleh revolusi di Tunisia dan Mesir, protes anti-Muammar Khadafi yang muncul di Benghazi dan kota-kota lain di Libya pada Februari 2011 menyebabkan pertempuran antara pasukan Khadafi dan pemberontak. Dukungan DK-PBB dan NATO kepada kekuatan pemberontak dan untuk melindungi warga sipil, berhasil menumbangkan kekuasaan Khadafi yang telah memerintah dengan kejam selama

empat dasawarsa. Diktator Khadafi sendiri tewas oleh serangan kelompok pemberontak di Sirte.

Sejak jatuhnya Khadafi, Libya terus dilanda konflik bersenjata di antara kelompok-kelompok milisi, militer dan pengikut rezim lama. Dari Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang terbentuk, hasil konferensi internasional tentang Libya yang disponsori PBB di Skhirat, Maroko, pada 17 Desember 2015, muncul Fayed al-Sarraj sebagai Perdana Menteri



(PM) sementara. Pemerintahannya yang berkedudukan di Tripoli hanya mengontrol wilayah sebelah barat Libya. Sedangkan Angkatan Bersenjata Libya (LNA) yang dipimpin orang kuat militer, Jenderal Khalifa Haftar, tidak mau bersatu dan menguasai wilayah timur negeri itu.

Sejak Juli 2014, situasi Libya terus memburuk, karena kelompok-kelompok milisia yang tidak tunduk pada GNA melancarkan serangan ke bandara Tripoli. Kelompok Ansar al-Sharia, yang berhasil menyerang Kedubes Amerika Serikat (AS) dan membunuh Dubes dan diplomat AS lainnya, berhasil menduduki hampir seluruh wilayah Benghazi. Selanjutnya, pada Maret 2015, kelompok teroris ISIS menguasai kota pelabuhan Sirte dan wilayah sekitarnya, namun PM Sarraj berhasil merebut kembali kota itu.

Pada 29 Mei 2018, dalam pertemuan di Paris, dengan ditengahi Pemerintah Prancis dan mendapat dukungan internasional, telah tercapai kesepakatan di antara pemerintah sementara al-Sarraj dan militer Haftar untuk menggelar pemilu di Libya pada akhir tahun 2019. Namun, friksi tidak dapat diakhiri sampai pertemuan di Italia, November tahun 2018. Dalam pertemuan pendahuluan di Abu Dhabi, sebelum jadwal pelaksanaan pemilu disepakati, baik al-Sarraj maupun Haftar sependapat bahwa demi mengakhiri fase transisional yang *chaotic* diperlukan pemilu di Libya sebagai jalan untuk menciptakan stabilitas secara menyeluruh.

Utusan Dewan Keamanan PBB, Ghassan Salame, pun pada

Februari 2019 telah merencanakan menggelar konferensi internasional di Libya dalam minggu berikutnya untuk mempersiapkan pemilu, demi membentuk pemerintahan yang sah dan representatif. Namun, upaya ini terancam tindakan ofensif pasukan Haftar ke selatan Libya, demi alasan memberantas ISIS dan pejihaid asing, pada pertengahan Januari 2019. PM Sarraj, orang sipil dan kaya di Libya yang didukung PBB, mengantisipasi langkah Jenderal Haftar untuk menguasai Libya, setelah ia melakukan serangan udara yang kian gencar ke Tripoli (*Al-Jazeera.com.*, 14 April 2019).

Sedangkan pasukan Sarraj berusaha mempertahankan Tripoli, sehingga 32 orang tewas, 62 luka-luka, dan 2.800 penduduk mengungsi (*Kompas*, 9 April 2019: 5). Situasi ini membawa Libya di ambang perang saudara lebih besar, yang implikasinya tidak hanya ke kawasan sekitar, tetapi lebih luas. Tulisan ini membahas tentang ancaman perang saudara di Libya dan akibatnya terhadap prospek Libya pasca-Khadafi. Dapatkah transisi demokrasi dan *the Arab Spring* bertahan?

Anarki Berkepanjangan Libya dan Implikasinya

Fase perang saudara baru setelah 8 tahun jatuhnya diktator Khadafi dihadapi Libya dengan resiko jauh lebih besar. Sebab, Jenderal Haftar menolak memenuhi seruan dunia internasional, termasuk kecaman Menlu AS, Mike Pompeo dan langkah Sekjen PBB, Antonio Guterres, menemuinya langsung untuk menghentikan aksi militernya. Sementara, pasukan

PM Sarraj telah melancarkan aksi penangkalan, dengan gelar operasi "Volcano of Anger". Sehingga, aksi pembersihan GNA atas semua kota dari pendudukan pasukan penyerang Haftar akan menimbulkan pengungsi lebih banyak mengalir ke Eropa, yang akan semakin merepotkan pemerintah negara yang dilalui, seperti Italia, Prancis, dan Yunani, dan juga otoritas Uni Eropa (UE). Sebelumnya, Libya, yang dekat dengan benua Eropa, hanya dipisahkan oleh Laut Mediterania yang tidak terlalu jauh jaraknya, telah menjadi jalur migrasi ke Eropa, termasuk yang dilakukan secara ilegal dan mengalami bencana di laut.

Selanjutnya, situasi domestik yang kacau, rapuh, penuh dengan milisi dan friksi, dengan absennya kontrol pasukan pemerintah sementara al-Sarraj, telah menarik ISIS lebih jauh untuk beroperasi secara terbuka di sana. Ketersediaan cadangan minyak Libya yang terbesar di wilayah Afrika Utara itu kian mendorong para pemberontak dan teroris untuk berkuasa di sana. Jenderal Haftar, mantan pengikut Khadafi, melihat solusi dan peluang efektif untuk menstabilkan Libya dengan meniru jalan atasannya tersebut lewat kudeta militer.

Alasan memerangi para teroris ISIS dan kelompok Islam ekstrim sebagai jalan masuknya, sehingga ia didukung oleh Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Rusia, walaupun ditentang kuat PBB, AS, UE dan Qatar, serta Italia, yang dengan perusahaan ENI-nya, berkepentingan atas cadangan energi Libya. Rusia sendiri sempat memperlihatkan sikap ambivalennya, sambil tetap

mendukung rezim sementara Sarraj. Sedangkan Prancis, yang mengancam lewat pertemuan G-7, pernah memerangi ISIS bersama Haftar di Benghazi tahun 2016.

Para penentang upaya kudeta militer baru oleh Jenderal Haftar di Libya pasca-Khadafi sebagai ancaman lebih besar bagi stabilitas kawasan dan global yang tengah diupayakan oleh dunia internasional, khususnya PBB, dengan dukungan AS dan UE. Gagalnya memulihkan keamanan dan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan stabil di Libya akan membahayakan strategi global dalam memerangi terorisme internasional dewasa ini. AS sangat berkepentingan dengan stabilitas Libya, selain karena memiliki pasokan minyak dan gas terbesar di kawasan itu yang diperlukannya, juga untuk akses menghabisi kelompok ISIS dan sisa-sisa Al-Qaeda dan kelompok ekstrim lainnya.

Makna Internasional Stabilitas Libya

Kecaman dunia atas tindakan Jenderal Haftar menyerang Tripoli menandakan bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan sama sekali, apalagi kalau itu dianggap sebagai solusi atas Libya yang terpecah belah. Karena, tindakannya justru membuat kacau Libya, yang seharusnya sudah dapat mempersiapkan pemilu sebagai solusi final untuk membawa negeri itu ke masa depan yang lebih baik. Tindakannya menertibkan milisi pro-ISIS melenceng, yang memicu konflik baru.

Aksi Jenderal Haftar akan memicu keterlibatan negara lain lebih jauh, antara lain Arab Saudi,

Rusia dan AS. Perkembangan situasi ini tidak hanya meningkatkan instabilitas Afrika Utara, namun juga Timur Tengah dan Eropa, terkait kesulitan mengurangi tekanan migrasi internasional. Ini juga menambah beban PBB dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan damai dewasa ini. Haftar tidak hanya telah menggagalkan pemilu yang telah digagas demi mengakhiri dualisme kekuatan dan ketidakpastian di negeri yang pernah dikuasai Prancis.

Solusi demokratis diperlukan, karena dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkonflik untuk duduk bersama mencari resolusi konflik yang komprehensif dan efektif. Pemimpin kelompok dan kekuatan milisi mereka dapat diarahkan untuk mengidentifikasi kepentingan bersama di Libya dan meraihnya bersama di masa depan. Mekanisme berbagi kekuasaan secara relatif adil dapat meredam ekstrimisme kelompok dengan ideologinya masing-masing.

Sebaliknya, kampanye militer unilateral akibat kontestasi kekuatan yang tidak dapat dihentikan, selain membahayakan pemerintahan transisional, juga nasib penduduk sipil Libya dan masa depan mereka. Solusi militer sepihak bukanlah pilihan tepat dan efektif, sehingga harus segera dihentikan, Sebagai konsekuensinya, semua pihak yang berkonflik harus kembali ke meja perundingan untuk menemukan resolusi konflik damai, dengan melakukan negosiasi politik.

Dengan demikian, munculnya kepemimpinan diktator baru, seperti halnya Kadhafi dulu, dengan hadirnya orang kuat baru

produk kudeta militer, di tengah maraknya aksi-aksi milisi bersenjata, dapat dihindari. Sebab, dengan banyaknya milisi bersenjata pendukungnya, dan juga sikap pembangkangannya, Jenderal Haftar sangat potensial menjadi Kadhafi baru di negeri padang pasir itu. Seperti pendahulunya, Haftar, sangat disayangkan, terlalu yakin dengan pandangan kelirunya bahwa solusi militer dapat menyelesaikan semua konflik di Libya.

Libya dan Prospek the Arab Spring

Serangan militer Haftar telah membatalkan konferensi PBB di Tripoli 14-16 April 2019, yang tujuannya untuk menyatukan warga Libya dengan menyelesaikan krisis secara bersama dan komprehensif. Proses transisi demokratis Libya pasca-jatuhnya pemerintahan diktator Kadhafi yang telah berkuasa selama 40 tahun, berada di ujung tanduk. Libya kini berada di antara dua pilihan: terancam kembali oleh perang saudara hebat dan berkepanjangan, atau munculnya penguasa diktator militer baru di bawah Jenderal Haftar melebihi Kolonel Khadafi di masa lalu.

AS, dengan AFRICOM, yang semula memerangi ISIS dan pejiha asing yang telah tersudut dan bermigrasi dari wilayah Levant dan mendestabilisasi Libya pasca-Khadafi, telah menarik pasukannya dari sana. Juga, negara-negara lain, termasuk India, yang telah berupaya mendukung upaya pemulihan keamanan dan destablisasi Libya di bawah bendera PBB. Selain mengancam

serangan Haftar, G-7 dan UE juga telah menekan dia untuk menghentikan ancaman kudetanya.

AS dan mitra koalisi internasionalnya lebih jauh telah menyerukan pihak yang bertikai di Libya untuk kembali melanjutkan langkah-langkah negosiasi politik yang telah disponsori dan disiapkan peta jalan damai oleh PBB. Dalam hal ini, sesungguhnya, Perwakilan Khusus Sekjen PBB, Ghassan Salame, telah melakukan langkah mediasi politik secara intensif. Namun, sikap Jenderal Haftar yang tidak memedulikan seruan internasional menjadi masalah bagi pemulihan situasi Libya menuju penyelenggaraan pemilu tahun ini juga.

Penutup

Setelah Tunisia dan Mesir, transisi demokratis di Libya tidak boleh menemui kegagalan. Jadi, walaupun prospek Afghanistan, Irak, dan Suriah masih dipertaruhkan, musim semi demokrasi di Libya tidak boleh berakhir begitu saja, sehingga kesempatan kian sirna untuk bisa membangun dunia Arab yang lebih aman dan damai. Dunia internasional, termasuk Indonesia, harus terus memberikan perhatian terhadap perkembangan Libya, agar kartu domino rekonstruksi dunia Arab dari berbagai konflik bersenjata, tidak terus berjatuh, tetapi justru dapat ditegakkan kembali.

Sebagai konsekuensinya, masyarakat internasional harus terus menekan Jenderal Haftar, agar ia menghentikan aksi militernya untuk menguasai Tripoli dan menggulingkan rezim sementara

al-Sarraj yang didukung PBB. Intervensi asing yang keliru hanya akan membuka *proxy war* baru, yang bisa berkembang lebih kompleks dan membuat situasi dunia Arab lebih kacau. Sekjen PBB, tidak boleh menyerah dengan respons Jenderal Haftar yang tidak konstruktif, dan dunia internasional harus terus memaksanya mendengar seruan mereka. Indonesia, yang saat ini menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, dan juga sebagai negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), perlu juga berkontribusi dalam mengupayakan solusi damai atas krisis yang terjadi di Libya.

Secara simultan, pemerintahan sementara PM Sarraj jangan dibiarkan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai. Prancis, mantan pemerintah kolonial, dapat diharapkan perannya untuk memulihkan stabilitas Libya. Negeri itu masih memiliki pengaruh atas kelompok yang bertikai, dengan daya tekan yang signifikan. Dunia berharap Prancis mau segera merespons, dengan menekan dan menengahi pihak yang berkonflik. Dengan demikian, solusi damai dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilu, dan bukan dengan desingan peluru.

Referensi

- Abd Rahman, Musthafa. "Pasukan PM Sarraj Pertahankan Tripoli," *Kompas*, 9 April 2019, hal. 5.
- Aquadini, Sita Planasri. "Libya di Ambang Perang Saudara." *Koran Tempo*, 9 April 2019, hal. 9.
- Dikarna, Kamran. "Enam Pemimpin Arab Lengser dalam 10 Tahun," *Republika*, 13 April 2019, hal. 8.

Elumami, Ahmed and Ayman al-Warfalli. "UN to Hold Conference as Planned Despite Surge in Fighting," *The Jakarta Post*, 8 April 2019, hal. 12.

"Haftar's Forces 'Set to Push into Capital Tripoli", Aljazeera.com., 14 April 2019, <https://www.aljazeera.com/news/2019/04/eastern-libya-forces-set-push-capital-tripoli-190414073517596.html>, diakses 15 April 2019.



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id
pptogin@yahoo.com

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert-Ludwids-Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan judicium magna cumlaude. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Kemitraan Strategis Indonesia- Amerika Serikat - RRC di Asia Pasifik" (2013), "Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis" (2015), "Ancaman Keamanan terhadap ALKI" (2015), dan "Indonesia di Tengah Persaingan China, Jepang, dan India" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.